



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA
PENUTUPAN MASA SIDANG IV
TAHUN SIDANG 2007—2008**

JUM'AT, 18 JULI 2008

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2008**



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA
PENUTUPAN MASA SIDANG IV
TAHUN SIDANG 2007—2008**

JUM'AT, 18 JULI 2008

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2008**

Paripurna ini kami nyatakan ditutup. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat bertugas selama masa reses. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa memberikan Taufiq dan HidayahNya kepada kita semua. *Amin ya Robal'Alamin.*

Atas segala perhatian saudara-saudara, kami mengucapkan terima kasih. Sekian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,



The signature is written in black ink in a cursive script. It appears to read "Agung Laksono".

H.R. AGUNG LAKSONO



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG IV
TAHUN SIDANG 2007-2008**

JUM'AT, 18 JULI 2008



***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*
Salam sejahtera bagi kita sekalian.**

**Yang kami hormati para Wakil Ketua,
Yang kami hormati para Anggota Dewan,**

Sidang Dewan yang terhormat,

Hari ini, Dewan akan segera menutup Masa Sidang IV Tahun Sidang 2007-2008 yang telah dimulai sejak 12 Mei 2008 yang lalu. Besok pagi Dewan akan segera memasuki Masa Reses sampai dengan tanggal 15 Agustus 2008 yang akan datang.

Dari catatan Sekretariat Jenderal, sejumlah Anggota Dewan telah menandatangi daftar hadir dari semua fraksi yang ada di lembaga ini. Oleh karena itu, dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2007-2008, dan sesuai dengan ketentuan Pasal

95 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum.

Masa Sidang IV yang telah berjalan selama 49 hari kerja atau 68 hari kalender adalah masa sidang yang padat dalam rangka pelaksanaan tiga fungsi Dewan, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan. Melalui agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPR RI, ketiga fungsi tersebut telah dilaksanakan secara optimal. Penutupan Masa Sidang IV sekaligus juga merupakan Penutupan Tahun Sidang 2007—2008, maka sesuai pasal 75 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPR RI, kami akan menguraikan secara garis besar kegiatan dan produk Dewan selama satu tahun berjalan.

Sebelum menyampaikan pidato penutupan, Pimpinan Dewan menginformasikan adanya berita duka, telah wafat rekan kita Sdr. Sulaiman Fadli, Wakil Ketua BURT, Anggota Komisi VII, dari Fraksi PPP, beberapa hari yang lalu. Semoga arwah beliau mendapat tempat yang baik di sisiNYA sesuai amal dan ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan memperoleh kekuatan lahir batin. Amin.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dua hari yang lalu, Pimpinan Dewan telah menerima surat Badan Legislasi DPR RI terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang legislasi, yaitu pengajuan usul 4 (empat) RUU yaitu RUU tentang Pencabutan Atas UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Usul pengajuan RUU-RUU tersebut, akan diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Pada Masa Persidangan IV, DPR telah menyelesaikan pembahasan 16 RUU, terdiri dari 12 RUU Pembentukan Kabupaten/Kota; RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.

53 Tahun 1999 tentang Pembentukan beberapa Kabupaten dan Kota Batam; RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang Undang; RUU tentang Perbankan Syariah; RUU tentang Usaha Menengah Kecil dan Mikro.

RUU UMKM yang telah disetujui DPR memiliki makna penting karena memberikan perlindungan, meningkatkan kesempatan dan kemampuan kepada UMKM untuk dapat memperluas lapangan kerja, pemerataan pendapatan yang pada akhirnya dapat membantu pengentasan kemiskinan. Dengan UU ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat yang merupakan strategi utama dalam pemberdayaan UMKM menuju kepada iklim usaha yang kondusif. Dengan adanya kemitraan yang diatur dalam UU ini, maka efisiensi dan produktifitas nasional dapat semakin meningkat, struktur ekonomi semakin kokoh dan seimbang.

UU Perbankan Syariah memberikan payung hukum yang kuat dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menumbuhkembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan. Dibentuknya komite perbankan syariah sebagai lembaga yang dibentuk Bank Indonesia dapat menjadi kanal proses positivisasi fatwa-fatwa di bidang syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Komite ini merupakan komite keahlian dengan komposisi yang berimbang dari unsur BI, departemen agama dan unsur masyarakat. Lahinya UU ini memberikan ruang bagi ekonomi syariah menjadi satu alternatif pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sekarang ini masih belum dapat keluar dari krisis.

Di antara RUU yang tidak dapat diselesaikan pada Masa Sidang IV, akan dilanjutkan pembahasannya pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2008-2009. Walaupun fokus Masa Sidang I adalah pembahasan RAPBN 2009 namun Pimpinan berharap berbagai RUU lain juga dapat memasuki pembicaraan tingkat II antara lain RUU Pilpres, RUU Perubahan UU No. 22/2003

tentang Susduk, RUU Kementerian Negara, dan beberapa RUU lainnya.

Untuk periode 2004—2009, RUU yang ditetapkan melalui Prolegnas berjumlah 284. Kita harus terus menerus memacu penyelesaian RUU khususnya yang sudah memasuki pembahasan tingkat I. Sekurang-kurangnya target 50%-60% harus dapat kita capai. Sampai hari ini, baru terselesaikan 120 RUU. Oleh karena itu, walaupun masa kampanye untuk Pemilu Legislatif telah dimulai pada bulan Juli 2008 ini, para Anggota Dewan yang juga anggota Partai Politik, harus tetap fokus kepada pelaksanaan tugas Dewan, sehingga masa kampanye yang panjang tidak akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Dewan di bidang perundang-undangan. Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi, Dewan melalui Badan Legislasi terus berupaya agar fungsi ini dapat terus menerus disempurnakan dan ditingkatkan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, dalam Masa Persidangan IV ini Dewan sudah memulai melakukan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2009. Untuk sementara, DPR dan Pemerintah sudah menyepakati asumsi dasar RAPBN Tahun Anggaran 2009 antara lain: nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp.5.200 sampai Rp.5.300 triliun; angka inflasi sebesar 5,8% sampai 6,5%; nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar Rp.9.000 sampai Rp.9.200; suku bunga SBI tiga bulan sebesar 7,5% sampai 8,5%; produksi (*lifting*) minyak mentah Indonesia ditargetkan sebesar 927.000 sampai 950.000 barel per hari; harga minyak mentah Indonesia sebesar 95 Dolar AS sampai 120 Dolar AS per barel; dan defisit anggaran ditetapkan sebesar 1,5% sampai 2,0%.

Dalam kaitan dengan RAPBN Tahun Anggaran 2009, Dewan meminta kepada Pemerintah agar mengevaluasi kembali program-program kompensasi kenaikan harga BBM. Apabila Pemerintah tidak menaikkan harga BBM pada tahun

2009 mendatang, maka Pemerintah harus lebih fokus pada pengembangan energi yang dapat diperbarui (*renewable energy*) sebagai alternatif pengganti energi BBM.

Persoalan lain yang perlu diantisipasi Pemerintah dalam RAPBN 2009 adalah lonjakan harga minyak mentah dunia yang sekarang melebihi 130 Dolar AS per barel. Dewan sebenarnya sudah mengingatkan Pemerintah untuk terus mencermati dan mengkalkulasi dampak kenaikan setiap 1 Dolar AS minyak mentah terhadap beban subsidi BBM dalam APBN. Sejatinya, kenaikan harga minyak mentah memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara dari ekspor minyak. Seandainya *lifting* minyak yang dapat diproduksi tersebut dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri atau bahkan dieksport, maka kenaikan harga minyak mentah dunia ini akan dapat memperkuat posisi APBN kita. Oleh karena itu, Dewan meminta Pemerintah untuk terbuka terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh negara dari hasil penjualan minyak mentah, sehingga Dewan dapat mengkalkulasikan berapa sebenarnya alokasi anggaran subsidi BBM pada APBN untuk tahun 2009 mendatang.

Selama ini, fungsi anggaran telah dilaksanakan jauh lebih maju daripada DPR periode-periode sebelumnya. Kualitas dan intensitas pembahasan anggaran cukup signifikan dilakukan, selain dilakukan oleh komisi-komisi Dewan juga oleh Panitia Anggaran. Namun, mencermati kasus-kasus yang melibatkan anggota Dewan akhir-akhir ini, bahkan mengakibatkan penangkapan Anggota Dewan oleh KPK, ke depan perlu dipikirkan ulang apakah Dewan perlu membahas anggaran nasional sampai kepada Satuan 3 untuk Departemen dan Lembaga. Pembahasan sampai kepada Satuan 3 membuat Dewan terlibat jauh dalam pembahasan yang sangat detail bahkan sampai kepada proyek.

Satu hal yang kiranya perlu kami ungkapkan di forum ini, bahwa komisi-komisi Dewan pada umumnya telah melakukan tindak lanjut atas temuan BPK RI baik dalam bentuk hasil pemeriksaan semester, maupun laporan keuangan Pemerintah

Pusat, dengan mitra kerjanya masing-masing. Rapat-rapat kerja dalam rangka tindak lanjut temuan BPK pada umumnya dilakukan cukup efisien. Dewan mengharapkan agar pemerintah perlu meningkatkan kinerja keuangan negara sehingga penilaian *disclaimer* yang diberikan BPK atau temuan-temuan yang sama tidak terulang setiap tahun.

Sidang Dewan yang terhormat,

Komisi-komisi juga telah melakukan *fit and proper test* terhadap para pejabat publik, yaitu Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Anggota KPU, Anggota Badan Pengawas Pemilu, Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Fungsi pengawasan yang sekarang intens dilaksanakan Dewan diwujudkan melalui penggunaan hak-hak Dewan, yaitu penggunaan Hak Interpelasi dan Hak Angket DPR. Salah satu hak yang sedang dilaksanakan adalah Hak Interpelasi untuk meminta keterangan kepada Presiden mengenai kebijakan antisipatif Pemerintah atas kenaikan harga pokok untuk menjamin ketersediaan harga kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau di masyarakat. Atas Keterangan Presiden yang diwakili oleh Menteri Keuangan dalam rapat paripurna Dewan dan jawaban tertulis Presiden, 17 Anggota Dewan tidak puas dan mengajukan Usul Hak Menyampaikan Pendapat Terhadap Jawaban Interpelasi Presiden Terkait Interpelasi Kenaikan Harga Bahan Pangan. Para pengusul berpendapat, Keterangan Presiden belum memberikan gambaran yang jelas atas substansi persoalan yang diajukan, seharusnya Pemerintah meningkatkan imunitas dalam menjaga ketahanan pangan. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) b Peraturan Tata Tertib DPR RI, usul Menyatakan Pendapat ini akan diproses sesuai prosedur dan mekanisme Dewan.

Untuk usulan interpelasi Lumpur Lapindo, DPR memutuskan memberi kesempatan lebih dahulu kepada Tim

Pengawas Lapindo untuk menyelesaikan tugas-tugasnya mengawasi kinerja Tim Nasional Penanganan Lumpur Lapindo, pengawasan atas pelaksanaan tuntutan ganti rugi dan mendorong Pemerintah untuk mehata kembali infrastruktur di kawasan tersebut.

Dalam Masa Sidang IV ini, DPR RI juga **sedang memproses penggunaan Hak Angket terhadap kenaikan harga BBM**. Panitia Angket yang terdiri dari 50 anggota Dewan telah terbentuk, demikian juga komposisi pimpinannya. Sesuai dengan UU No. 6 tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, Panitia Angket sedang dalam proses pendaftaran yang selanjutnya akan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin legalitas. Dalam 1—2 minggu ke depan, fraksi-fraksi dalam Panitia Angket akan menyusun program kegiatan, kemudian melalui kompilasi oleh tim kecil, program kegiatan ini akan disahkan dalam rapat pleno Panitia Angket pada awal Masa Sidang I. Panitia Angket ini menjadi fokus utama perhatian masyarakat. Kalangan Dewan berpendapat, **Panitia Angket ini harus lebih fokus kepada hal-hal yang lebih substansial, tidak hanya terpaku kepada kebijakan harga BBM, tetapi harus menyoroti seluruh kebijakan energi nasional, khususnya aspek pengejolaan perminyakan di Indonesia**. Sektor perminyakan di Indonesia adalah sektor industri yang tidak seluruhnya transparan dimana masyarakat termasuk DPR tidak sepenuhnya paham, termasuk mengenai **angka-angka dan kepatuhan bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor, jumlah produksi nyata di lapangan dengan yang tercatat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis minyak di Indonesia, bagaimana cost recovery dibayar, siapa yang mengawasi kilang-kilang di berbagai daerah, dan lain-lain**. Inilah yang harus diusut dan ditelusuri oleh Panitia Angket.

Selanjutnya telah pula dibentuk Tim Pengawas Penyelesaian Kasus KLBI dan BLBI. Tim yang baru dibentuk ini diminta segera melaksanakan tugasnya untuk melakukan

pengawasan terkait kasus KLBI dan BLBI. Dewan akan senantiasa berusaha mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga kasus-kasus yang meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara seperti ini, akan senantiasa mendapat pengawasan Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Guna mencermati pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dewan telah membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 dengan tujuan agar terjaga kesadaran dari seluruh *stake holders* di Aceh untuk merawat perdamaian di bumi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 merupakan faktor kunci, sehingga semua pihak harus bekerjasama untuk mewujudkannya. Hasil kerja tim pemantau ini akan disampaikan kepada Dewan.

Hal lain yang juga menjadi perhatian Dewan, berkaitan dengan polemik yang terkait dengan kerjasama Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat dalam masalah NAMRU-2. Komisi I DPR RI telah memberikan 3 alternatif dalam masalah ini, yaitu (1) kerjasama dihentikan, (2) kerjasama dihentikan operasionalnya dan dievaluasi sesuai dengan kepentingan nasional (3) kerjasama dievaluasi, dilanjutkan dengan revisi signifikan terhadap perjanjian kerjasama dengan beberapa persyaratan baru yang ditentukan oleh pihak Indonesia. Pada intinya, Dewan berpesan bahwa setiap kerjasama internasional yang dilakukan Pemerintah harus mengutamakan kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip kesetaraan yang saling menguntungkan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Permasalahan krisis energi yang terjadi belakangan ini khususnya energi listrik mengundang keprihatinan Dewan. Krisis energi ini dampaknya sangat luas terhadap iklim investasi. Keterbatasan pasokan energi sudah lama dikeluhkan investor,

bahkan ada investor yang akan menarik investasinya karena tidak adanya jaminan ketersediaan energi listrik. Tanpa jaminan pasokan energi, pengusaha sulit mengembangkan bisnisnya dan berdampak kepada keterbatasan penciptaan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, sangat diperlukan audit manajemen energi. Keterbatasan pasokan listrik bahkan kebijakan untuk melakukan pemadaman bergilir, mengakibatkan pengusaha sulit mengembangkan aktivitas dan produktivitasnya. Krisis energi listrik sebenarnya tidak perlu terjadi asalkan pemerintah mampu mengelola sumber alam secara benar dan baik. Krisis energi yang terjadi saat ini, menggambarkan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah.

Di samping kebijakan pemerintah yang tidak populer dalam masalah energi, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga LPG volume 12 Kg sangatlah tidak realistik di tengah-tengah kondisi masyarakat yang masih terbebani dengan kenaikan harga BBM. Pada kenyataannya, Pemerintah sudah memulai program konversi dari minyak tanah ke gas. Seharusnya, Pemerintah terlebih dahulu membenahi tata-niaga LPG di dalam negeri sebelum Pemerintah menaikkan harga LPG untuk konsumsi masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Tahapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan oleh KPU sudah mulai berlangsung. Salah satu hal yang terpenting adalah tahapan penetapan partai politik peserta pemilu 2009 yang sudah diumumkan oleh KPU tanggal 7 Juli 2008 lalu, bahkan nomor urut partai partai pemilu 2009 juga telah ditetapkan. Tiga puluh empat Partai Politik berhak mengikuti pemilu 2009 yang terdiri dari 18 partai politik baru, dan 16 partai politik yang telah lolos berdasarkan Pasal 316 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini telah membatalkan salah satu ketentuan pasal 316

huruf d UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu, telah menjadi kontroversi. Seperti diketahui, huruf d pada pasal tersebut meloloskan secara otomatis 9 partai politik yang mendapat kursi di DPR sebagai peserta Pemilu 2009, kendati tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold (ET)* sebesar 3%. Berkaitan dengan putusan MK ini, Dewan berpendapat bahwa **putusan MK tidak serta merta dapat diimplementasikan karena pentahapan pemilu oleh KPU telah berjalan**.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang lain, yaitu tentang syarat domisili calon anggota DPD yang harus bertempat tinggal di provinsi yang bersangkutan, Dewan menghargai putusan ini. Namun demikian, Dewan berpendapat bahwa teknis syarat domisili bagi calon anggota DPD sepenuhnya menjadi domain KPU. Yang penting, proses pencalonan sebagai anggota DPD harus transparan dan jujur. Terhadap diperbolehkannya anggota partai politik menjadi calon anggota DPD adalah semata-mata untuk menghargai hak seluruh warga negara yang hendak menjadi calon anggota DPD. Akan tetapi, calon yang berlatar belakang dari partai politik juga harus benar-benar berupaya memperjuangkan aspirasi daerah dan menghilangkan baju partai politiknya dari mana dia berasal.

Dalam kaitannya dengan penetapan masa kampanye yang berjalan cukup panjang lebih dari 9 bulan, yang telah ditetapkan oleh KPU, **Pimpinan Dewan mengharapkan agar partai-partai politik dapat menjalankan kampanye dengan bermartabat, tetap menjunjung persatuan dan kesatuan, dan menjaga suasana tetap kondusif**.

Terkait dengan Pilkada di beberapa daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang akan berlangsung sepanjang tahun 2008 dan 2009, Dewan berharap agar para tokoh masyarakat di wilayah tersebut mendukung suasana masa kampanye yang tertib dan aman. Hal ini sangat penting karena tahun 2008 dan 2009 adalah tahun dimana suhu politik diperkirakan akan meningkat. Pimpinan Dewan berharap dengan ikut sertanya calon perseorangan dalam pilkada, situasi

dan kondisi tidak menjadi lebih pelik dan rawan konflik. Proses demokratisasi harus diikuti oleh kedewasaan berpikir dari semua *stake holders* baik pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Saat ini Dewan masih membahas RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan Bamus DPR serta Panitia Khusus, maka diharapkan RUU ini selesai pada masa persidangan yang akan datang. RUU ini sangat penting untuk segera diselesaikan, untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi KPU untuk mempersiapkannya. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin bangsa yang memiliki wawasan maju dan memiliki jiwa kepemimpinan adalah sesuatu yang menjadi komitmen bersama. Oleh karena itu, menjadi kewajiban partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang benar-benar berintegritas, memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dan memiliki visi untuk memajukan bangsa dan mampu mengimplementasikan visi tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait dengan perkembangan sejumlah masalah di bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan, yang menjadi perhatian Dewan adalah Pelaksanaan UAN (Ujian Akhir Nasional) akhir-akhir ini yang masih menyisakan berbagai persoalan, dari persoalan kebocoran soal ujian, penyalahgunaan kewenangan, sampai kepada penilaian apakah program UAN sebagai alat evaluasi akhir masih perlu dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang. Paradigma baru UU Sisdiknas juga tidak dikenal adanya UAN. Pemerintah hanya memiliki kewajiban membuat kebijakan dan standar pendidikan nasional. Keterlambatan pembagian ijazah di beberapa daerah yang terjadi saat ini juga perlu mendapat perhatian kita

bersama, karena hal ini sedikit banyak akan mengganggu proses penerimaan siswa tahun ajaran baru.

Persoalan lain adalah mengenai pembelian buku pelajaran yang dirasakan masih memberatkan orang tua siswa. Hal ini karena program buku digital yang dicanangkan pemerintah dengan maksud menekan harga buku, kenyataannya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dewan juga mengharapkan bahwa wacana sekolah gratis perlu didorong pelaksanaannya pada tingkat SD dan SMP. Dari sekian banyak daerah di seluruh Indonesia, baru beberapa daerah saja yang menggratiskan biaya sekolah. Kenaikan harga BBM dan kebutuhan harga pokok sangat berpengaruh terhadap beban masyarakat menjelang tahun ajaran baru.

Masih ada satu masalah di bidang kesra yang menjadi perhatian kita khususnya berkaitan dengan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebagai pengganti program Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Askeskin). Karena belum tuntasnya perencanaan Jamkesmas oleh Pemerintah dan masih adanya masalah berkaitan dengan penyelesaian tunggakan klaim provider tahun 2007, maka pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin masih mengalami berbagai kendala di lapangan sebagaimana kasus yang terjadi baru-baru ini. Masyarakat miskin yang seharusnya memperoleh jaminan kesehatan, menjadi terabaikan. Ini jelas sangat memprihatinkan mengingat hal ini menyangkut keselamatan manusia. Dewan meminta Pemerintah agar segera menyelesaikan program Jamkesmas dengan sebaik-baiknya dan melakukan pendataan warga miskin untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan gratis.

Sidang Dewan yang terhormat,

Densus 88 Anti Teror Mabes Polri telah berhasil menangkap sejumlah tersangka teroris yang diduga merupakan anak buah dari Muhamad Kastari dan Noor M Top, di

Palembang pada akhir bulan Juni yang lalu. Terhadap keberhasilan penangkapan ini, Dewan memberikan apresiasi kepada Kepolisian RI yang telah berhasil menangkap para teroris. Oleh karena itu, proses hukum perlu dituntaskan segera, perlu dilakukan proses peradilan yang terbuka dan kepada mereka yang diduga sebagai tersangka, tetapi diberikan hak-haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Di lain pihak, Dewan meminta pihak Polri untuk lebih bersikap profesional dalam menangani berbagai demonstrasi yang marak akhir-akhir ini sebagai ekses dari kenaikan harga BBM. Demonstrasi dijamin oleh UU, tetapi tindakan demonstran yang anarkhis, jelas merupakan suatu pelanggaran hukum. Oleh sebab itu unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat perlu dilakukan secara tertib.

Di bidang penegakan hukum, kita memberikan apresiasi kepada langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upayanya untuk memberantas korupsi. Penangkapan terhadap oknum Kejaksaan Agung, pejabat dan mantan pejabat daerah, dan beberapa anggota Dewan, jelas memberikan nilai tambah bagi lembaga ini.

Dengan ditangkap dan ditahannya sejumlah anggota DPR oleh KPK karena dugaan pelanggaran hukum, Pimpinan DPR mempersilahkan agar proses hukum berjalan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, di sisi lain perlu juga tetap dijunjung asas praduga tak bersalah. KPK juga diminta dapat melakukan tindakan yang sama terhadap semua pihak yang terkait dengan kasus yang melibatkan Anggota DPR. Hal ini sejalan dengan dogma hukum "*the equality before the law*", dan ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", sehingga tidak ada pandangan miring terhadap KPK bahwa KPK melakukan tebang pilih dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam kaitan ini, Pimpinan DPR mengingatkan bahwa Dewan saat ini telah menetapkan Peraturan DPR Nomor 01/DPR-RI/IV/2007–2008 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPR-RI. Dengan adanya peraturan ini BK sudah memiliki pedoman dalam menegakkan etika dan menjaga Kode Etik DPR RI dalam rangka menjaga citra dan wibawa lembaga DPR. Karena aktifitas dan putusan BK sekarang ini dipantau oleh masyarakat, maka Pimpinan DPR berharap BK dapat bekerja secara cermat, dan profesional sehingga keputusan yang diambil dan bersifat final, dapat dipertanggungjawabkan.



Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam hubungan antar parlemen, DPR RI telah menerima berbagai parlemen dari beberapa negara, sebagai pelaksanaan atas timbal balik (resiprokal). Beberapa kunjungan parlemen negara-negara sahabat ke Indonesia adalah Parlemen Laos, Parlemen Australia, Parlemen China, Parlemen Rumania, Parlemen Vietnam, HDAC Kongres Amerika Serikat, Parlemen Brunei Darussalam, Parlemen Uzbekistan, Parlemen Ceko, dan Parlemen Paraguay.

DPR telah mengirim berbagai delegasinya ke sidang-sidang parlemen internasional seperti Sidang Umum AIPA ke-28 di Kuala Lumpur Malaysia, Sidang IPU di Jenewa Swiss, dan Cape Town Afrika Selatan, Sidang APPF di Auckland Selandia Baru, Sidang PUIC di Kairo Mesir, dan Sidang Umum APA ke-2 di Teheran Iran.

Kontribusi aktif DPR di bidang internasional juga ditunjukkan dengan kontinuitas beberapa anggota DPR menduduki berbagai posisi penting di berbagai organisasi internasional di *Inter Parliamentary Union* (IPU), dan *Parliamentary Union of Islamic Countries* (PUIC). Keinginan DPR RI sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia

untuk memberikan pengaruh di fora internasional dengan mencalonkan diri sebagai Presiden IPU, telah mendapat dukungan dari parlemen-parlemen di dunia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Timor Leste semakin menunjukkan kemajuan dalam beberapa hal. Antara lain, dengan telah ditandatanganinya Naskah Pernyataan Bersama Antara Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Timor Leste Ramos Horta, berkaitan dengan laporan hasil akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste. Komisi yang dibentuk antara dua negara ini telah bekerja sejak Agustus 2005. Kedua kepala pemerintahan menyatakan penyesalan yang mendalam atas kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Temuan pelanggaran HAM berat, latar belakang dan konteks terjadinya pelanggaran HAM, sama sekali tidak ditujukan kepada proses hukum, melainkan untuk proses penyembuhan luka-luka lama, rekonsiliasi dan menjamin peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa depan. Kita perlu menggarisbawahi pernyataan bersama ini, dan yang penting tidak perlu ada dendam masa lalu. Masing-masing pemerintahan negara secara moral dan politik berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi KKP. Kita juga tidak ingin ada internalisasi atas masalah ini.

Selanjutnya, situasi politik dan keamanan yang berkembang di berbagai kawasan dunia juga menjadi perhatian Dewan, terutama kawasan-kawasan tertentu yang hingga saat ini masih belum juga menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik, seperti yang terjadi di Timur Tengah, Irak, Afghanistan, Pakistan serta di beberapa negara Afrika. Bahkan belakangan ini kita dikejutkan kembali oleh aksi terorisme, yakni peristiwa serangan bom mobil yang diarahkan ke Kedutaan

Besar India di Kabul, Afghanistan, yang bersebelahan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang mengakibatkan lebih dari 40 orang tewas. Masih seringnya terjadi aksi-aksi kekerasan di sejumlah negara rawan konflik tentu menjadi keprihatinan kita bersama, karena yang menjadi korban seringkali masyarakat sipil yang tidak berdosa dan juga dapat mengancam keselamatan Warga Negara Indonesia, juga para diplomat kita.

Sementara itu, Dewan menggarisbawahi dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika tentang Pembangunan Kapasitas Bagi Palestina, yang digelar pertengahan bulan ini di Jakarta. Pejabat setingkat menteri dari 50 negara Asia Afrika hadir dalam konferensi guna membahas apa yang diperlukan untuk menyambut Negara Palestina Merdeka. Partisipasi aktif Indonesia menggambarkan bahwa kita sangat concern memberikan dukungan politis bagi negara Palestina sebagai suatu negara yang merdeka.

Situasi yang berkembang di kawasan Asia Tenggara juga menarik untuk dicermati, terutama terkait dengan perkembangan politik yang terjadi di Malaysia dan Thailand belakangan ini. Dewan berpendapat bahwa apa yang terjadi di kedua negara tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi, yang memang diharapkan dapat ditumbuhkembangkan secara sehat. Khusus Myanmar, Dewan kembali berharap kepada ASEAN untuk dapat memainkan peran yang lebih efektif lagi dalam mendorong berkembangnya demokrasi di negara tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dewan, Tim Peningkatan Kinerja DPR RI dalam kurun waktu satu tahun ini telah melakukan berbagai evaluasi atas pelaksanaan tugas dan

fungsi Dewan sebagai tindak lanjut rekomendasi Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR. Dewan terus menerus melakukan berbagai pembenahan, dan langkah ke arah itu sudah ada. Sementara itu, agar kinerja Dewan lebih efektif dan efisien, Tim Kinerja menyarankan untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib DPR RI seperti perlunya penataan ulang program dan jadwal pembahasan RUU di forum rapat paripurna, agar rapat-rapat paripurna dapat berjalan secara efektif, tidak membuang energi dan waktu. Kehadiran anggota Dewan dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan dan paripurna diharapkan dapat dipantau oleh masing-masing fraksi, sehingga tingkat kedisiplinan anggota dapat terjaga. Demikian pula evaluasi yang dilakukan terus menerus berkaitan dengan fungsi dukungan di Sekretariat Jenderal. Dalam rangka mendukung kinerja tersebut, sekarang ini telah diangkat tambahan tenaga-tenaga ahli untuk seluruh anggota Dewan yang diharapkan dapat membantu anggota Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pada akhir pidato ini perlu kami informasikan bahwa, rapat paripurna Dewan telah menyetujui **Penggunaan Lambang DPR RI Bukan Lencana** yang selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan DPR RI. Melalui Keputusan DPR ini diharapkan dapat dicegah penyalahgunaan penggunaan lambang-lambang DPR oleh **orang yang tidak berhak dan tidak pada tempatnya**.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah hal-hal yang perlu kami sampaikan dan menjadi pokok-pokok kegiatan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2007-2008 yang menjadi perhatian Dewan dalam rangka pelaksanaan tiga fungsi Dewan. Selanjutnya, dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillahi Robil'alamin*, maka